

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI FILIPINA YANG
MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERIKANAN DI
INDONESIA TANPA PERIZINAN BERUSAHA DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 Jo.
PERPU NOMOR 2 TAHUN 2022 Jo. UNDANG-UNDANG NO. 6
TAHUN 2023**

Fanny Cynthia Dewi

Program Peminatan Hukum Pidana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas
Hukum, Universitas Surabaya

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Hwian Christianto S.H., M.H.
2. Peter Jeremia Setiawan S.H., M.H.

ABSTRAK

Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dengan berbagai Sumber Daya Perikanan. Namun dengan luasnya wilayah laut Indonesia menyebabkan timbulnya celah pemanfaatan Sumber Daya Perikanan secara illegal. Tujuan penelitian adalah menganalisis Pertanggungjawaban Korporasi Filipina Yang Melakukan Kegiatan Usaha Perikanan Di Indonesia Tanpa Perizinan Berusaha Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023. Tipe penelitian adalah yuridis normative dengan pendekatan masalah *statute approach* dan *conceptual approach*. Bahan hukum penelitian meliputi bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 serta Bahan Hukum Sekunder yaitu jurnal, buku dan literatur terkait *Illegal Fishing*. Teknik Analisis melalui Analisis Kualitatif Deduktif. Hasil penelitian membuktikan EEC sebagai Nahkoda Kapal terbukti melanggar Pasal 27A ayat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 karena melakukan pengoperasian kapal FB.LB. LIAM GIL-2 berbendera Filipina milik perusahaan NRT *Integrated Industries Inc* tanpa dilengkapi Perizinan Berusaha. Korporasi yaitu NRT *Integrated Industries Inc* dapat dikenakan pertanggungjawaban tindak pidana berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 13 tahun 2016 karena memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana Korporasi dan dapat dipidana denda dengan tambahan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari pidana denda yang dijatuhkan.

Kata Kunci : Tindak Pidana Perikanan, Korporasi, Perizinan Berusaha

**THE RESPONSIBILITY OF PHILIPPINE CORPORATIONS
THAT CONDUCT FISHERY BUSINESS ACTIVITIES IN
INDONESIA WITHOUT A BUSINESS LICENSE IS REVIEWED
FROM LAW NUMBER 45 OF 2009 Jo. PERPU NUMBER 2 OF
2022 Jo. LAW NO. 6 YEARS 2023**

Fanny Cynthia Dewi

*Criminal Law Specialization Program, Legal Studies Program, Faculty of Law,
University of Surabaya*

Supervisor :

- 1. Dr. Hwian Christianto S.H., M.H.*
- 2. Peter Jeremiah Setiawan S.H., M.H.*

ABSTRACT

Indonesia has a vast marine area with various fisheries resources. However, with the vastness of Indonesia's maritime territory, there is a gap in the illegal use of fishery resources. The aim of the research is to analyze the liability of Philippine corporations that carry out fisheries business activities in Indonesia without a business permit in view of Law Number 45 of 2009 Jo. Law no. 6 of 2023. The type of research is normative juridical with a statute approach and conceptual approach. Research legal materials include Primary Legal materials, namely Law no. 6 of 2023 as well as Secondary Legal Materials, namely journals, books and literature related to Illegal Fishing. Analysis Techniques through Deductive Qualitative Analysis. The results of the research prove that EEC as Ship Master was proven to have violated Article 27A paragraph of Law Number 6 of 2023 and Article 97 paragraph 1 of Law Number 6 of 2023 for operating the FB.LB ship. LIAM GIL-2 has a Philippine flag belonging to the company NRT Integrated Industries Inc without a Business License. The corporation, namely NRT Integrated Industries Inc, may be subject to criminal liability based on Article 4 of Supreme Court Regulation No. 13 of 2016 because it meets the elements of corporate criminal responsibility and can be sentenced to a fine with an additional weight of 1/3 (one third) of the fine imposed.

Keywords: Fisheries Crimes, Corporations, Business Licensing